Penerapan GCG dan Manajemen Risiko Dalam Upaya Penguatan Daya Saing Industri BPR/BPRS

Oleh ;
Joko Suyanto, SE.MM
Ketua Umum
Dewan Pengurus Pusat
Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia
(PERBARINDO)

Disampaikan dalam acara :
Seminar Nasional dan Rakerda DPD Perbarindo DKI Jakarta dan Sekitarnya
"Dampak Penerapan GCG dan Manajemen Risiko Bagi Industri BPR/BPRS"

Jakarta, 14 April 2016

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Industri BPR
2. Tantangan Bisnis Industri BPR/BPRS
3. Penerapan GCG dan MR Industri BPR/BPRS
4. Strategi dan Daya Dukung Penguatan Industri BPR/BPRS

Perkembangan
Industri BPR

Perkembangan Aset dan KYD

Pertumbuhan Aset (Rp Milyar)

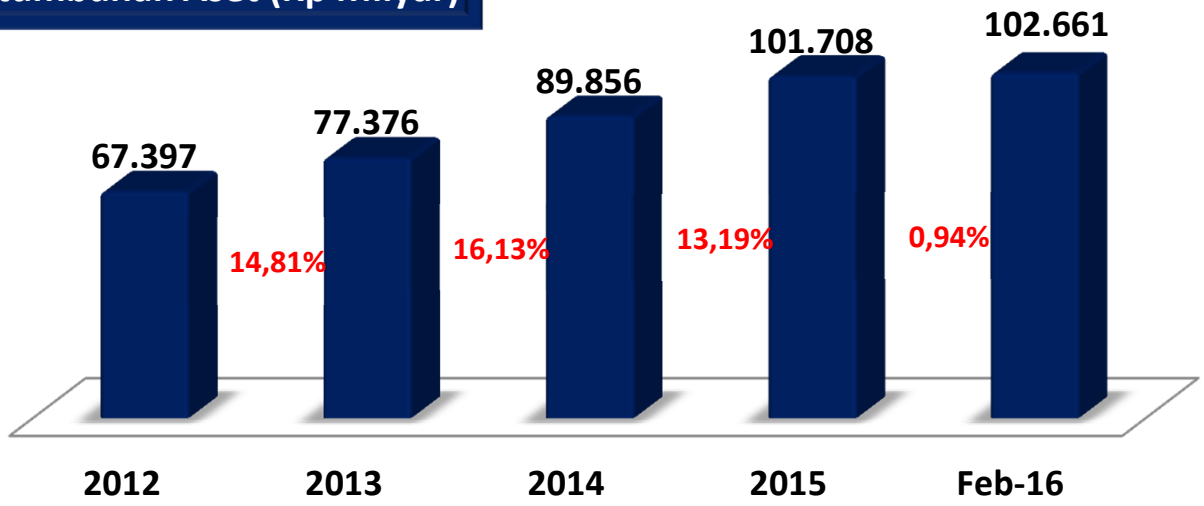

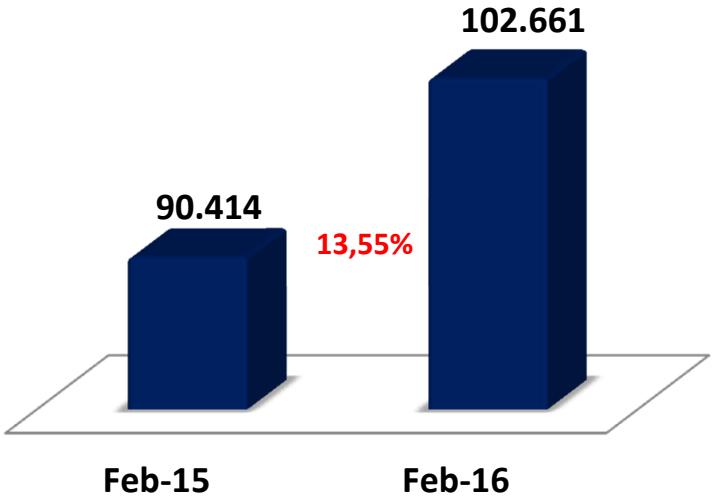

Pertumbuhan KYD (Rp Milyar)

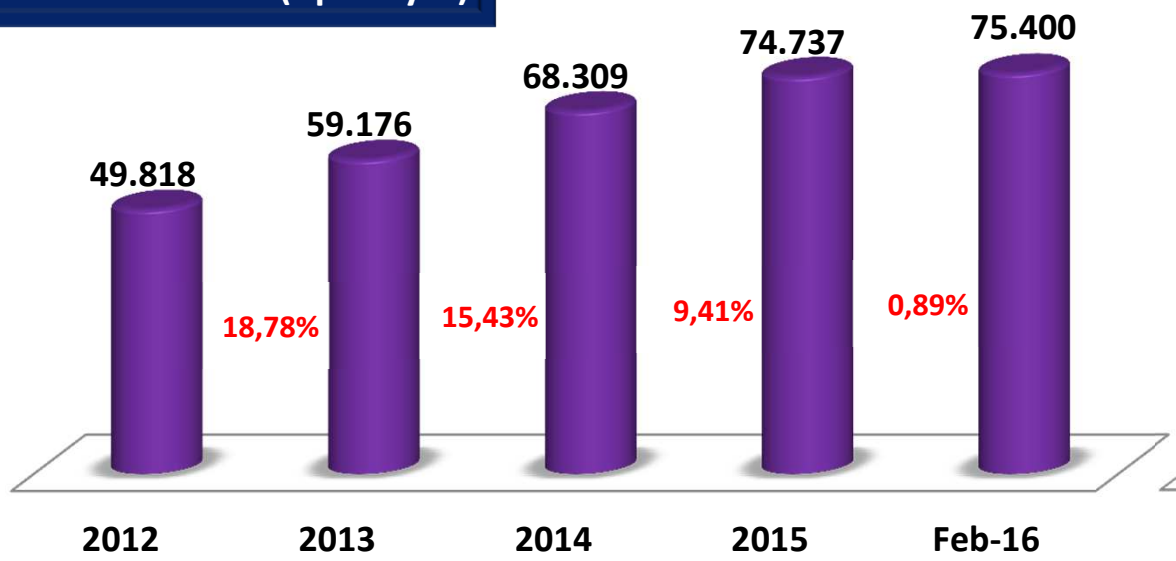

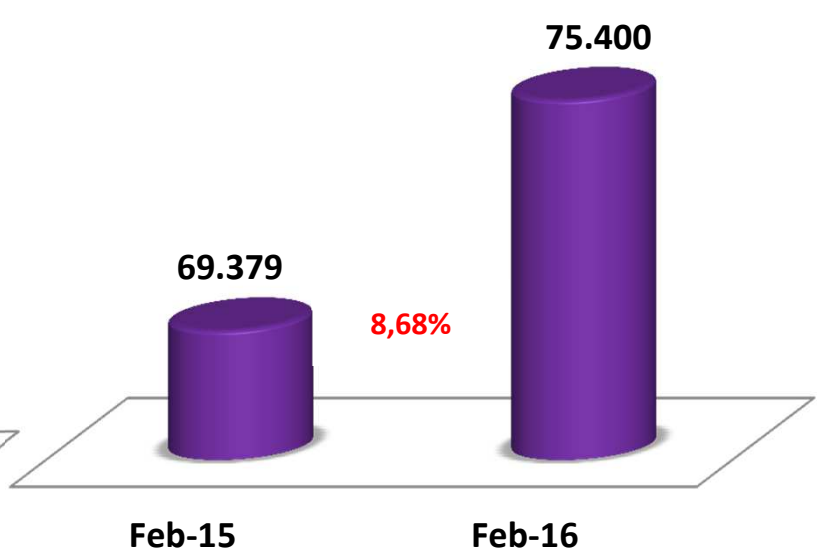

Sumber : Statistik BPR Konvensional (www.ojk.go.id)

Perkembangan DPK Industri BPR

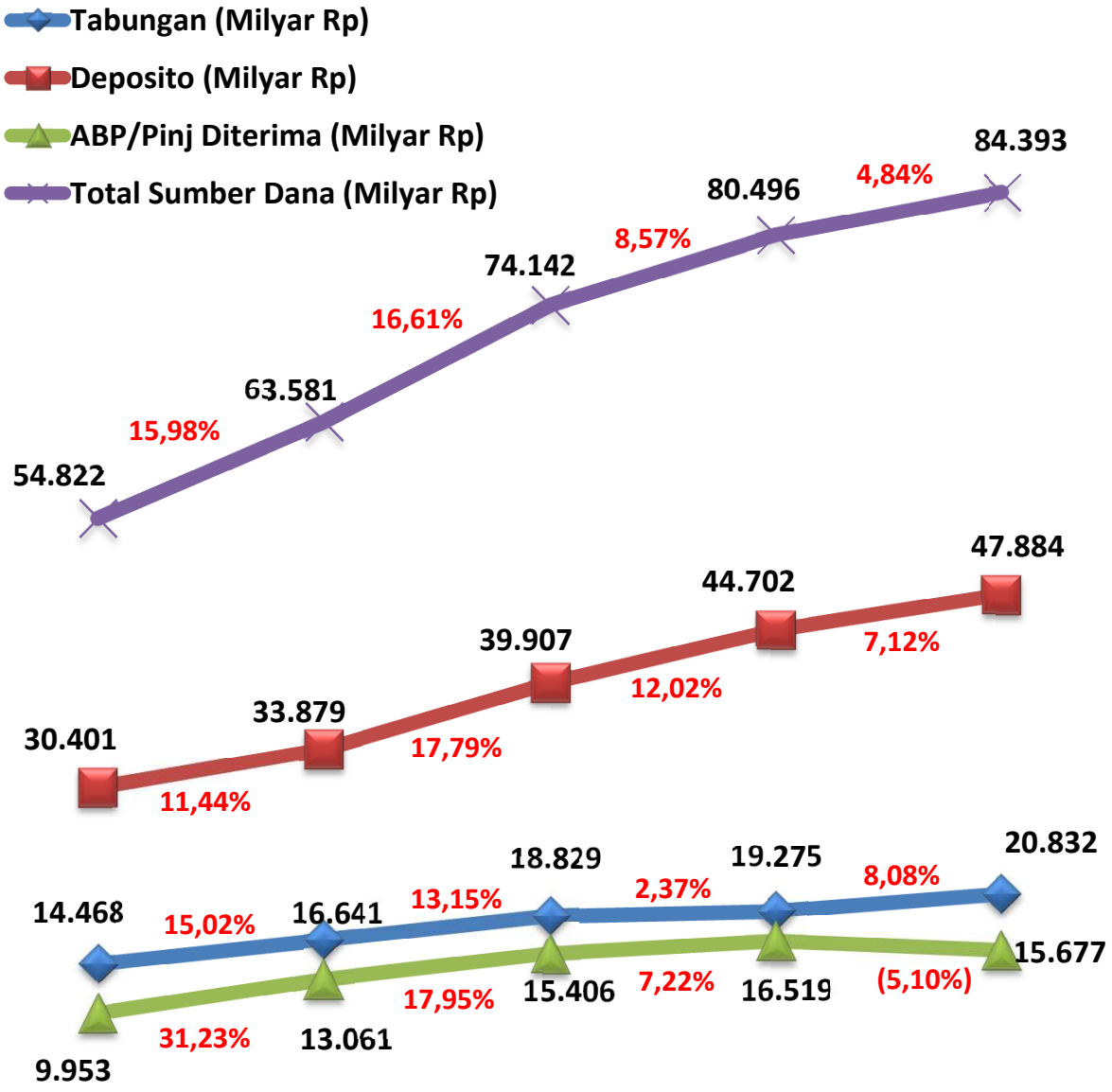

Sumber : Statistik BPR Konvensional (www.ojk.go.id)

Struktur Dana (Februari 2016)

No	Jenis Dana	Nominal	Porsi (%)
1	Tabungan (Milyar Rp)	20.832	24,68
2	Deposito (Milyar Rp)	47.884	56,74
3	ABP/Pinj diterima (Milyar Rp)	15.677	18,58
Total Sumber Dana		84.393	100,00

Jumlah Nasabah dan Rata – rata Nominal

Jumlah Nasabah

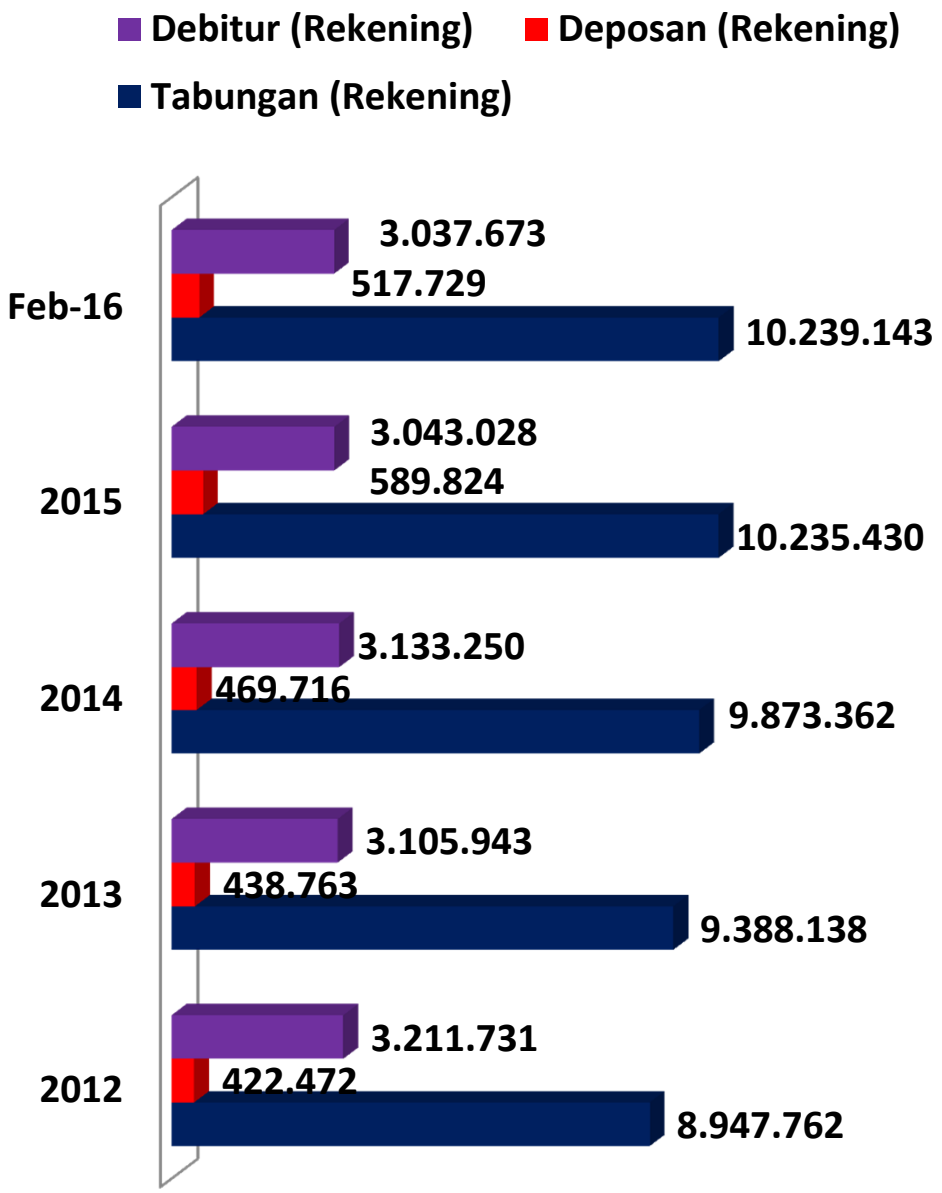

Rata – rata Nominal

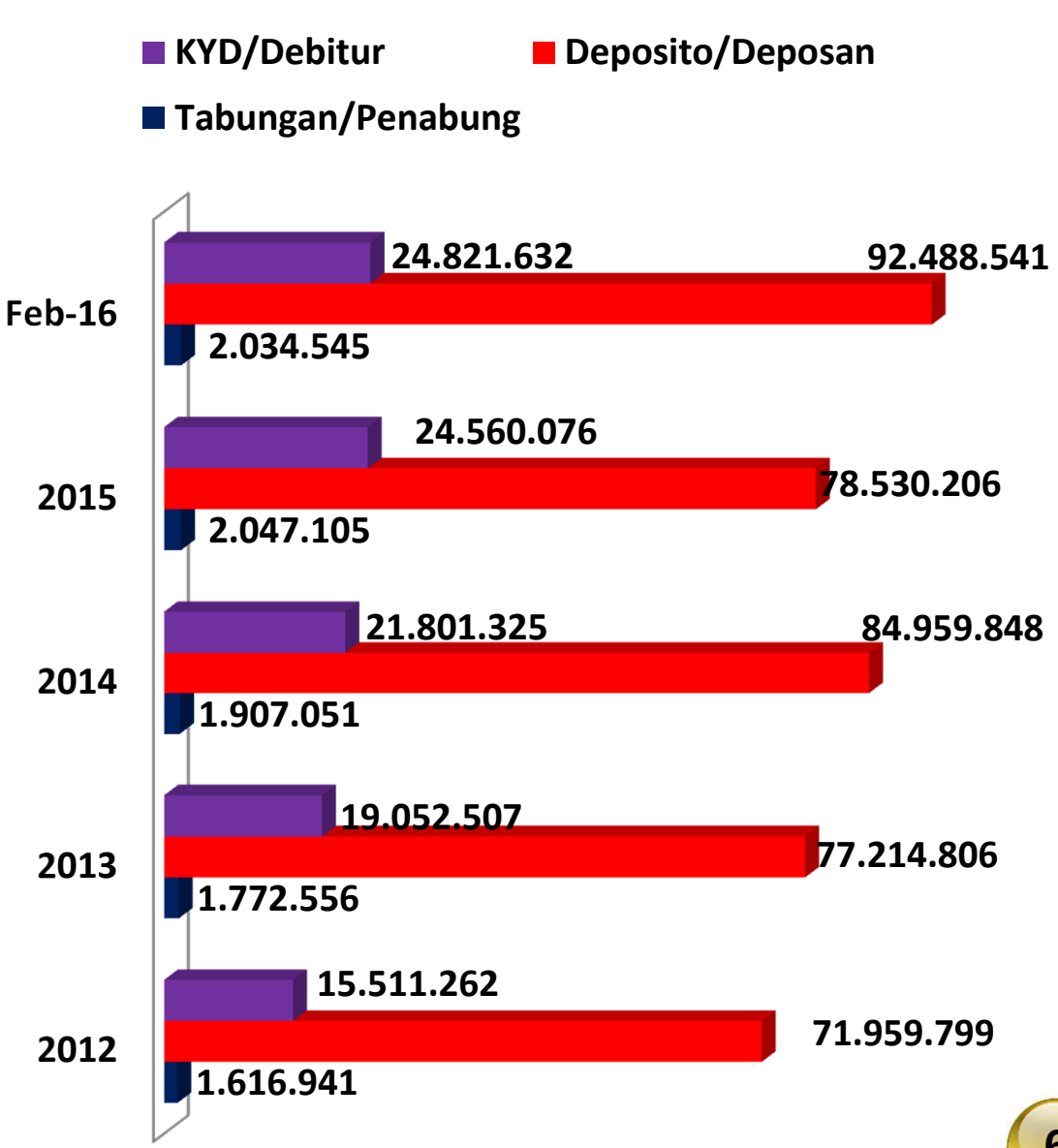

Sumber : Statistik BPR Konvensional (www.ojk.go.id)

Rasio Keuangan Industri BPR

Indikator	2012	2013	2014	2015	Feb 2016
LDR (%)	78,63	84,26	79,4	76,7	77,18
ROA (%)	3,46	3,38	2,99	2,69	2,7
ROE (%)	32,63	31,71	27,95	24,58	24,41
CAR (%)	27,55	28,48	28,02	28,99	31,38
BOPO (%)	77,77	77,65	80,3	81,77	82,36
NPL (%)	4,75	4,45	4,76	5,4	6,22

Sumber : Statistik BPR Konvensional (www.ojk.go.id)

Kelembagaan Industri BPR

- **Jumlah BPR posisi Februari 2016 sebanyak 1.639 BPR, dengan jumlah jaringan kantor 5.981 kantor. terdiri dari 1.639 kantor pusat, 1.570 kantor cabang dan 2.772 Kantor Kas. Pembukaan kantor tersebut sangat dipengaruhi oleh besarnya volume usaha BPR.**

- **Dari sisi aset sangat beragam, BPR yang telah memiliki aset diatas Rp 10 milyar terdapat 1,260 BPR, Kemudian BPR yang memiliki Aset dainatar Rp 5 milyar sd 10 milyar ada 218 BPR, selanjutnya yang berada di kisaran Rp 1 milyar sd Rp 5 milyar ada 155 BPR. Sedangkan BPR yang dibawah Rp 1 milyar terdapat 6 BPR.**

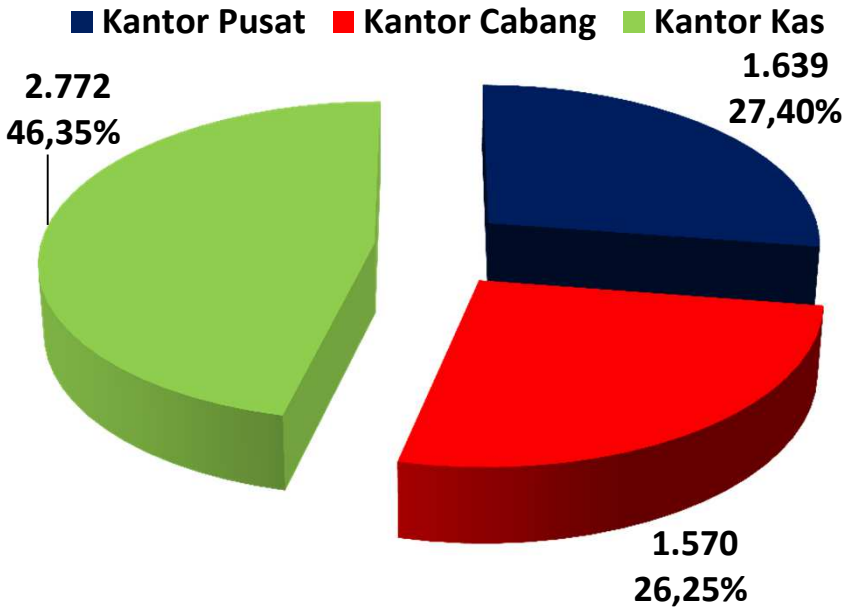

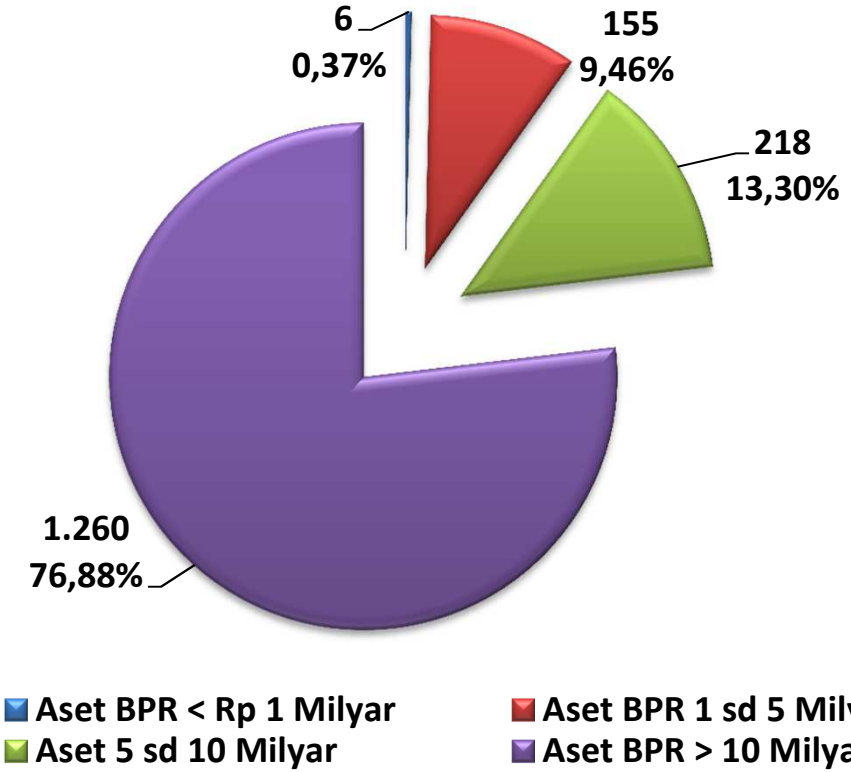

Sumber : Statistik BPR Konvensional (www.ojk.go.id)

Sebaran Kantor BPR

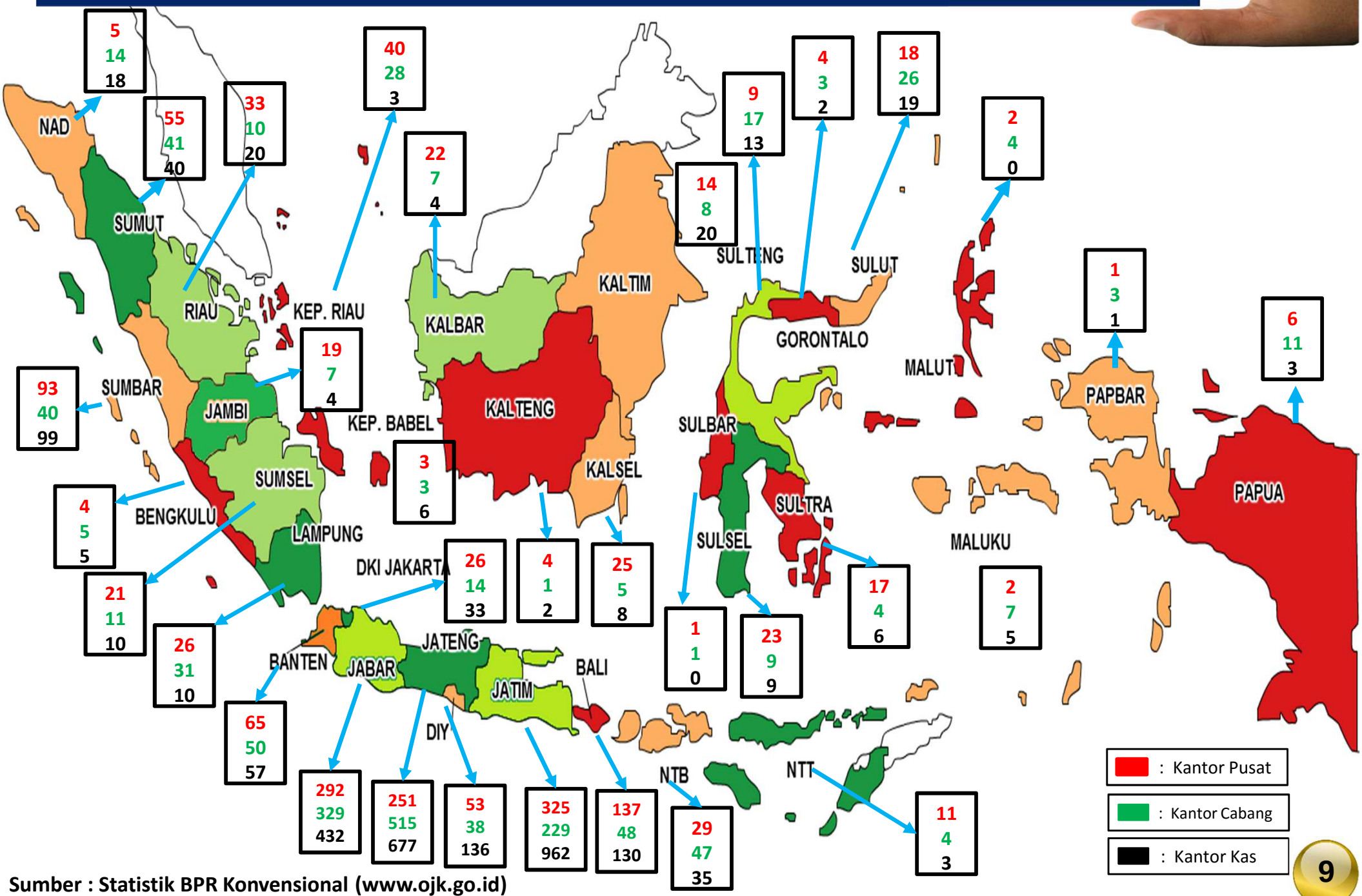

Sumber : Statistik BPR Konvensional (www.ojk.go.id)

Tantangan Bisnis Industri BPR

Perlambatan Ekonomi

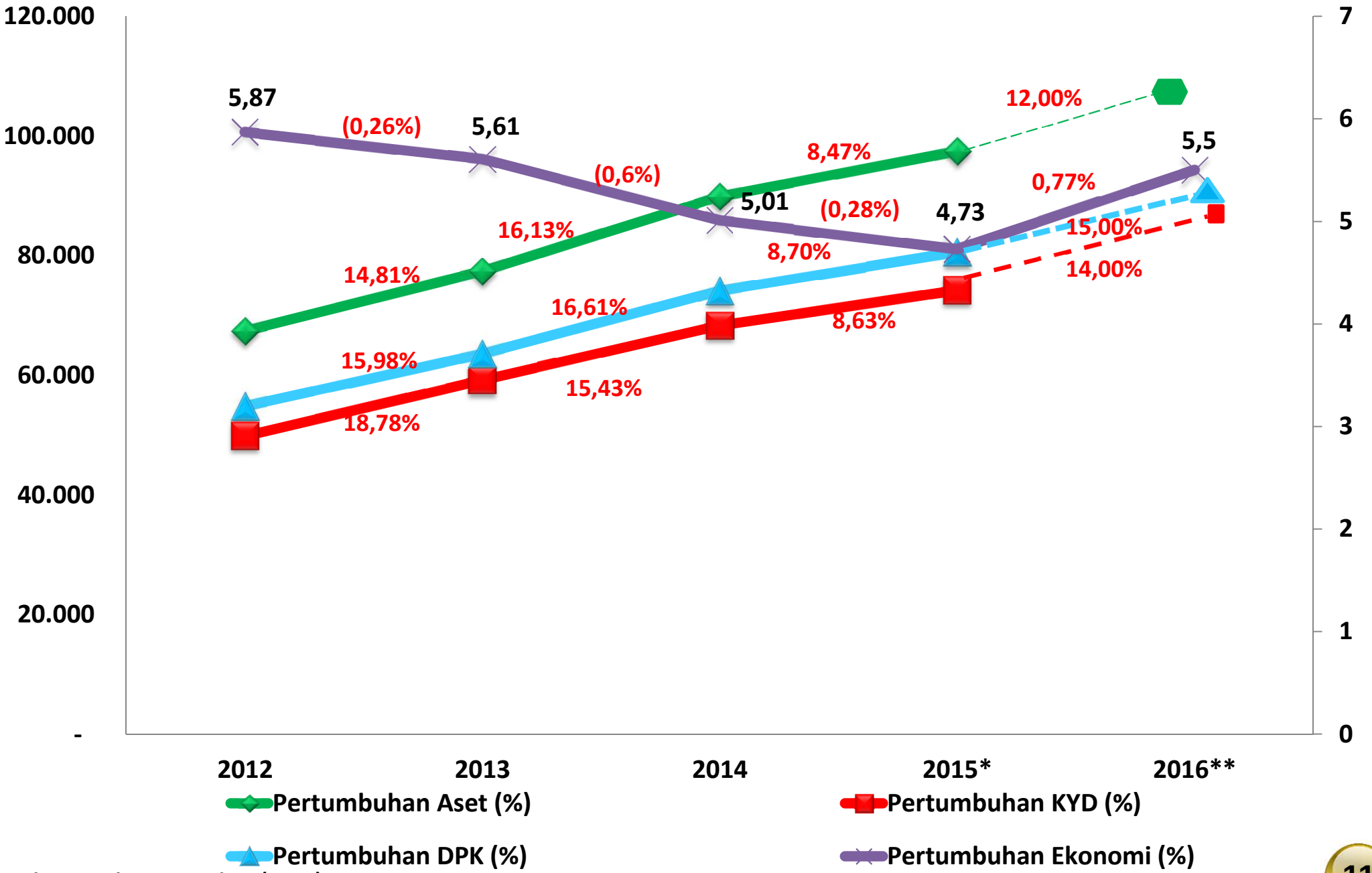

Sumber : BI dan Kemenkeu (2015)

Perlambatan Ekonomi Indonesia

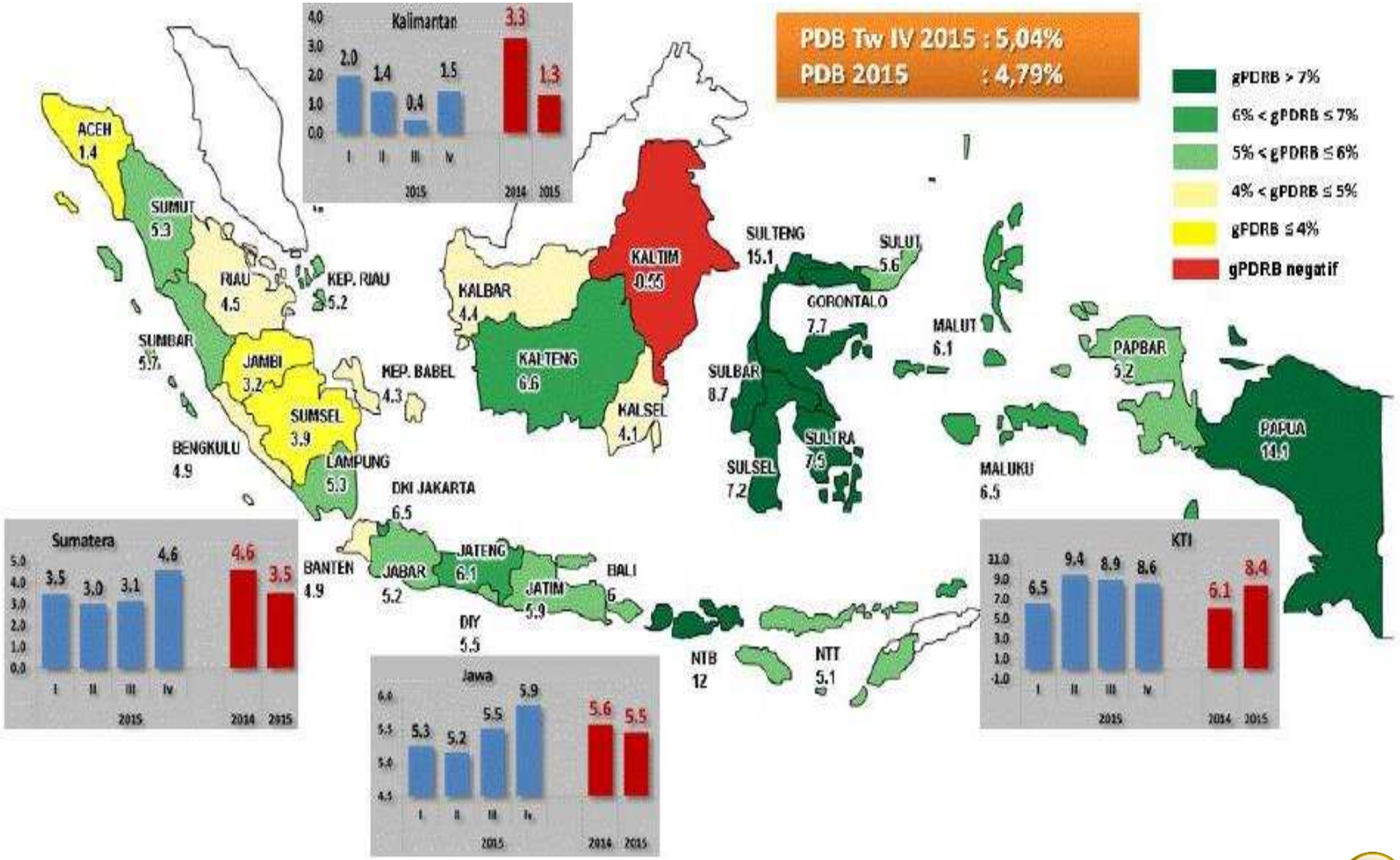

Sumber : Bank Indonesia (2016)

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

No	Nama Provinsi	Pertumbuhan (%)			ROE (%)	NPL (%)
		Eknomi	Aset	KYD		
1	NAD	1,42	25,11	6,44	11,88	11,26
2	Sumatera Utara	5,08	11,69	10,19	26,67	8,11
3	Sumatera Barat	4,71	6,16	3,04	6,74	9,84
4	Riau	0,22	10,00	13,34	5,52	14,42
5	Jambi	4,53	1,46	-1,08	-5,92	17,8
6	Sumatera Selatan	4,89	8,66	8,21	15,46	12,84
7	Bengkulu	5,17	23,80	22,93	11,71	9,57
8	Lampung	5,18	15,90	13,16	26,16	1,36
9	Kep. Babel	3,96	31,77	36,39	19,77	8,63
10	Kep. Riau	5,72	16,62	15,1	45,37	3,28
11	DKI Jakarta	5,96	19,75	20,64	12,56	6,88
12	Jawa Barat	5,03	12,80	2,45	18,95	7,89
13	Jawa Tengah	4,95	16,68	12,66	26,13	6,87
14	D.I Yogyakarta	5,3	17,03	13,15	18,7	6,25
15	Jawa Timur	5,44	12,53	8,76	21,28	6,81
16	Banten	5,18	29,24	21,41	6,88	9,2
17	Bali	6,29	20,82	18,49	51,55	3,03

No	Nama Provinsi	Pertumbuhan (%)			ROE (%)	NPL (%)
		Eknomi	Aset	KYD		
18	Nusa Tenggara Barat	26,12	15,08	12,39	26,59	9,65
19	Nusa Tenggara Timur	5,11	23,17	16,33	19,02	6,92
20	Kalimantan Barat	4,23	2,92	12,83	17,91	7,02
21	Kalimantan Tengah	6,66	10,62	19,32	56,1	1,71
22	Kalimantan Selatan	3,86	25,21	2,23	7,69	18,47
23	Kalimantan Timur	-0,85	24,85	7,47	9,25	12,31
24	Sulawesi Utara	6,28	6,13	2,92	22,73	13,13
25	Sulawesi Tengah	15,08	27,32	27,47	96,85	1,27
26	Sulawesi Selatan	7,34	20,07	9,3	52,8	3,19
27	Sulawesi Tenggara	6,96	47,58	40,34	13,95	10,22
28	Gorontalo	5,8	-1,82	-3,53	9,87	19,51
29	Sulawesi Barat	6,72	-3,83	696,25	34,38	2,03
30	Maluku	5,27	19,72	21,36	106,33	0,59
31	Maluku Utara	6,76	14,28	41,03	64,88	4,5
32	Papua	8,00	27,53	27,62	90,1	2,37
33	Irian Jaya Barat	6,43	56,12	60,32	150,35	3,32

Sumber : Statistik BPR Konvensional (www.bi.go.id) dan BPS (diolah)

Tantangan Bisnis BPR

KEWAJIBAN PEMBERIAN KREDIT UMKM OLEH BANK UMUM
PELUANG SEKALIGUS TANTANGAN BAGI INDUSTRI BPR

Melalui PBI No. 14/22/PBI/2012, Bank Indonesia mewajibkan setiap Bank Umum untuk menyalurkan Kredit atau pembiayaan UMKM paling rendah 20% dari total kredit atau pembiayaan yang disalurkan, dengan tahapan sebagai berikut :

Tahun	Ketentuan Penyaluran Kredit UMKM Bagi Bank Umum
2015	Paling Kurang 5% dari total kredit atau pembiayaan
2016	Paling Kurang 10% dari total kredit atau pembiayaan
2017	Paling Kurang 15% dari total kredit atau pembiayaan
2018	Paling Kurang 20% dari total kredit atau pembiayaan

TANTANGAN

PERSAINGAN DI PASAR KREDIT UMKM SEMAKIN KETAT

PELUANG

POTENSI BERMITRA DENGAN BANK UMUM – LINKAGE PROGRAM

Tantangan Bisnis BPR

Penyaluran KUR 14 Agsts'15 s.d. 31 Des'15

Bank Pelaksana	KUR Mikro		KUR Ritel		KUR Penempatan TKI		TOTAL	
	Plafon (Rp Juta)	Debitur	Plafon (Rp Juta)	Debitur	Plafon (Rp Juta)	Debitur	Plafon (Rp Juta)	Debitur
BRI	14.419.705	927.877	6.299.645	45.653	4.190	312	20.723.540	973.842
Bank Mandiri	777.692	40.065	2.012.279	23.154	0	0	2.789.971	63.219
BNI	7.906	385	2.329.078	8.561	7.348	427	2.344.332	9.373
Bank Sinarmas					8.918	518	8.918	518
Maybank							0	0
BPD NTT	2.560	165	9.364	87			11.924	252
BPD Kalbar	20	1	865	5			885	6
TOTAL	15.207.883	968.493	10.651.231	77.460	20.456	1.257	25.879.570	1.047.210
Total Penyaluran KUR (Rp Juta)								25.879.570
Total Debitur KUR								1.047.210

Penyaluran KUR 1 Jan'16 s.d. 24 Maret'16

Bank Pelaksana	KUR Mikro		KUR Ritel		KUR Penempatan TKI		TOTAL	
	Plafon (Rp Juta)	Debitur	Plafon (Rp Juta)	Debitur	Plafon (Rp Juta)	Debitur	Plafon (Rp Juta)	Debitur
BRI	13,289,480	855,967	6,295,870	45,637	4,058	312	19,589,408	901,916
Bank Mandiri	793,775	40,928	2,076,843	23,912	0	0	2,870,618	64,840
BNI	7,108	347	1,961,066	7,274	6,834	399	1,975,008	8,020
Bank Sinarmas					8,918	518	8,918	518
Maybank							0	0
BPD NTT	2,560	165	9,364	87			11,924	252
BPD Kalbar	20	1	865	5			885	6
TOTAL	14,092,943	897,408	10,344,008	76,915	19,810	1,229	24,456,761	975,552
Total Penyaluran KUR (Rp Juta)								24,456,761
Total Debitur KUR								975,552

Pemerintah menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 12% menjadi 9% yang berlaku mulai 4 Januari 2016.

Penyaluran KUR 2016 juga ditargetkan hingga Rp 100 triliun dan berpeluang hingga Rp 120 triliun.

AA Gede Ngurah Puspayoga
Menteri Koperasi dan UKM

Tantangan Bisnis BPR

Persyaratan Penyelenggaraan Kegiatan Laku Pandai bagi BPR (POJK No. 19 Tahun 2014)

- Modal Inti Rp 100 milyar
- TKS Tergolong Sehat
- NPL maksimum 5%
- Rasio KPMM 12%
- Tidak dalam Keadaan Rugi
- Tidak terdapat pelanggaran ketentuan

→ BPR Penyelenggara Laku Pandai

BPR yang termasuk kategori BPRKU3 (Modal inti diatas Rp 50 milyar)

(POJK No 12 Tahun 2016)

Kondisi Modal Inti BPR

RANGE	JML BPR
≥ 100M	10(0,6%)
90 < 100M	0(0,0%)
80 < 90M	2(0,1%)
70M < 80M	6(0,4%)
60M <70M	4(0,2%)
50M < 60M	7(0,4%)
35M < 50M	21(1,3%)
25M < 35M	37(2,3%)
15M < 25M	93(5,7%)
6M < 15M	292(17,8%)
3M <6M	422(25,7%)
< 3M	749(45,6%)

Posisi Mei 2015

Sumber : OJK (Seminar Infobank 2015)

Tantangan Bisnis BPR

Kegiatan Laku Pandai (POJK No. 19 Tahun 2014)

Agen LAKU PANDAI Perorangan	Agen LAKU PANDAI Badan Hukum
a. bertempat tinggal di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai, b. memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas dan integritas yang baik, c. memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan tetap lainnya selama paling singkat 2 (dua) tahun, d. belum menjadi Agen dari Bank penyelenggara Laku Pandai yang kegiatan usahanya sejenis, e. lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh Bank penyelenggara Laku Pandai.	a. berbadan hukum Indonesia yang: i. diawasi oleh otoritas pengatur dan pengawas dan diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan, atau ii. merupakan perusahaan dagang yang memiliki jaringan retail outlet. b. memiliki reputasi, kredibilitas dan kinerja yang baik, c. memiliki usaha yang menetap di satu lokasi dan masih berlangsung, paling singkat 2 (dua) tahun, d. mampu melakukan manajemen likuiditas sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank penyelenggara Laku Pandai, e. mampu menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai, f. memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai, dan g. lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh Bank penyelenggara Laku Pandai.

Kelemahan apabila melalui Agen Perorangan :

- **Agen Perorangan menyebakan tingkat persaingan pada level mikro akan semakin sengit, karena jangkauan layanan Bank semakin luas.**
- **Agen Perorangan resisten melakukan tindakan fraud, bila sistem pengawasannya lemah. Sehingga akan mempengaruhi citra layanan perbankan pada wilayah tersebut.**
- **Agen Perorangan bisa membuat adanya kecenderungan praktik – praktik Bank dalam Bank.**

Tantangan Bisnis BPR

Produk Laku Pandai , Sesuai dengan POJK NO. 19 Tahun 2014

- Bank wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif kepada nasabah mikro paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari total portofolio kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dalam rangka Laku Pandai (Pasal 8 POJK No. 19 Tahun 2014)
- Produk tabungan dan kredit menjadi kompetitor bagi BPR.

Tantangan Bisnis BPR : MEA

4 (Empat) pilar Pengembangan MEA, yaitu :

- **ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas.**
- **ASEAN sebagai kawasan deng daya saing ekonomi yang tinggi dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerse.**
- **ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Kamboja, Myanmar dan Vietnam.**
- **ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.**

Tantangan Bisnis BPR

- **Persaingan usaha akan semakin ketat dengan semakin terbukanya akses pemodal asing ke Pasar Indonesia.**
- **Brand awareness masyarakat terhadap BPR relatif lebih rendah dibandingkan kepada Bank Umum dan Bank Asing di Indonesia**
- **Berkembangnya pembiayaan Non Bank seperti multifinance dan koperasi**

Tantangan Bisnis BPR

UMKM : ***Feasible but not Bankable***

4

MEMBUTUHKAN PENJAMINAN KREDIT

2

Akses kepada sumber pembiayaan menjadi salah satu penghambat perkembangan UMKM.

Keterbatasan Aspek Legal Formal

Kesulitan memenuhi Ketentuan teknis perbankan

Asymmetric Information ("Kekurangpercayaan")

1

Mensyaratkan Agunan Fisik

3

Sumber: Jamkrindo

Penerapan
GCG dan Manajemen Risiko
Industri BPR/BPRS

Pentingnya Penerapan GCG Bagi BPR

Tantangan BPR

- Penyebab BPR CIU, disebakan oleh Fraud
- Beberapa BPR tumbuh besar melebihi beberapa Bank Umum
- Kompetensi SDM yang perlu ditingkatkan

Hasil Pengawasan Regulator

- Praktek Perbankan tidak sehat
- Hasil temuan pemeriksaan yang berulang
- Tingkat kepatuhan terhadap Peraturan rendah
- Rendahnya kesadaran akan risiko

Tata Kelola

- Pemenuhan Jumlah Pengurus
- Perangkapan Jabatan
- Indepedensi Pengurus dari Pemilik

Faktor Eksternal

- Rencana penerapan RBS
- Penerapan MR terintegrasi
- Meningkatkan reputasi BPR

Pengertian dan Tujuan Penerapan GCG

Definisi Good Coorporate Governance atau Tata Kelola BPR yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 4/POJK.03/2015 TGL. 31 MARET 2015 adalah sebagai berikut :

"Suatu Tata Kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparansi), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (fairness)

OTORITAS JASA KEUANGAN

PERTIMBANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK MENERAPKAN GCG :

1. Semakin kompleksnya Risiko yg dihadapi Bank
2. Untuk meningkatkan kinerja Bank karena banyaknya Bank yang bermasalah
3. Untuk melindungi kepentingan Stakeholder (pemilik/nasabah) dan pemegang saham
4. Penerapan Etika perbankan secara benar (budaya kerja)
5. Untuk memperkuat kondisi internal Bank .
6. Meningkatkan profesionalisme SDM Bank

Tujuan Penerapan GCG

1. Menciptakan kejelasan hubungan kerja antara Bank dengan Stakeholer.
2. Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan SDM Bank dan pengelolaan risiko secara lebih efektif.
3. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Bank
4. Meningkatkan profesionalisme SDM

Kondisi riil

OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Memang GCG di Indonesia ini masih bersifat LIPS SERVICE mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Banyak Bank/BPR yang collaps karena pengurus Bank/BPR tidak melaksanakan GCG dengan penuh tanggungjawab.
2. Penataan dan pengelolaan kekayaan dan keuangan Bank/BPR banyak yang belum dilakukan secara profesional dan masih banyak untuk kepentingan pribadi.
3. Pengelolaan risiko di BPR masih lemah bahkan banyak yang tidak paham tentang risiko, sehingga performance BPR menurun karena tidak paham risiko yang ditimbulkan.

Tujuan Akhir Penerapan GCG bagi BPR

TAAT ATURAN & DISIPLIN

Corporate Image

MENATA

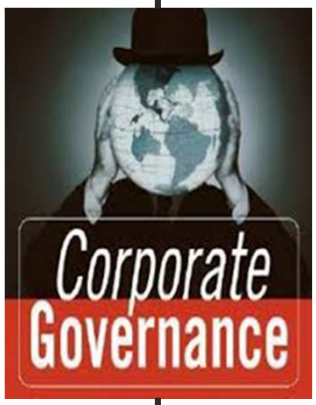

ORGAN BANK
-RUPS
-Dekom/Dewas
-Direksi

5 PRINSIP- GCG

1. Terbangunya Waskat
2. Terciptanya Budaya sadar Resiko
3. Terciptanya Budaya Kerja yg Baik

BPR

SUKSES

KELOLA

TANGGUNGJAWAB & PROFESIONAL

Personil Image

Penerapan GCG BPR Berdasarkan Modal Inti

Strata	Tata Kelola
Modal Inti ≥ Rp 80 Milyar	Menerapkan Tata Kelola secara penuh • Minimal direksi 3 orang • Minimal komisaris 3 orang dan maksimal sebanyak jumlah direksi • Minimal 50% dari dewan komisaris adalah komisaris independen • Pembentukan komite audit dan pemantau risiko (pembentukan komite renumerasi dan nominasai tidak wajib) • Pembentukan satuan kerja audit intern, kepatuhan dan manajemen risiko
Modal Inti Rp 50 Milyar sd Rp 80 Milyar	Menerapkan Tata Kelola secara penuh kecuali komite • Minimal direksi 3 orang • Minimal komisaris 3 orang dan maksimal sebanyak jumlah direksi • Minimal 1 Orang adalah komisaris independen • Tidak wajib membentukl komite audit, pemantau risiko dan komite renumerasi dan nominasai • Pembentukan satuan kerja audit intern, kepatuhan dan manajemen risiko
Modal Inti < Rp 50 Milyar	Menerapkan Tata Kelola secara terbatas (fungsi) • Minimal direksi 2 orang • Minimal komisaris 2 orang dan maksimal sebanyak jumlah direksi • Tidak wajib membentuk komite • Penunjukan pejabat eksekutif untuk menjalankan fungsi audit intern, Kepatuhan dan manajemen risiko

Penerapan GCG BPR

1) **BPR wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.**

   Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana bisnis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan intern pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi

2) **Penerapan Tata Kelola paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut :**

   a. **pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;**
   b. **pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;**
   c. **kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;**
   d. **penanganan benturan kepentingan;**
   e. **penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;**
   f. **penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;**
   g. **batas maksimum pemberian kredit;**
   h. **rencana bisnis BPR;**
   i. **transparansi kondisi keuangan dan non keuangan**

Penerapan Manajemen Risiko BPR

Ruang Lingkup

BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam POJK No 13 Tahun 2015

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko :

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit yaitu :
   a. Kebijakan manajemen Risiko
   b. Prosedur manajemen risiko
   c. Penetapan limit risiko
3. Kecukupan proses dan sistem yaitu :
   a. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
   b. Sistem informasi manajemen risiko
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Jenis Risiko

1. Risiko Kredit
2. Risiko Operasional
3. Risiko Kepatuhan
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Strategik
6. Risiko Reputasi

Penerapan Manajemen Risiko BPR

1. Kredit
2. Operasional
3. Kepatuhan
4. Likuiditas
5. Strategik
6. Reputasi

BPR yang memiliki modal inti ≥ Rp 50 Milyar Wajib Menerapakn Manajemen Risiko untuk seluruh jenis risiko

atau

BPR dengan modal inti < Rp 50 M dan memiliki total aset > Rp 300 M dan memenuhi kondisi sbg :

1. **Memiliki paling sedikit 10 Kantor cabang; dan/atau**
2. **Melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu ATM/kartu debit**

→ **6 Risiko**

BPR yang memiliki modal inti ≥ Rp 15 milyar < Rp 50 milyar Wajib Menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit untuk 4 jenis risiko

atau

BPR dengan modal inti > Rp 50 M dan memiliki total aset < Rp 300 M dan memenuhi kondisi sbg :

1. **Memiliki kurang dari 10 Kantor cabang; dan/atau**
2. **Tidak meelakukan kegiatan sebagai penerbit kartu ATM/kartu debit**

→ **4 Risiko**

BPR yang memiliki modal inti < Rp 15 Milyar Wajib Menerapakn Manajemen Risiko paling sedikit untuk 3 jenis risiko

→ **3 Risiko**

Strategi dan Daya Dukung Penguatan Industri BPR/BPRS

Strategi dan Daya Dukung Pengembangan Bisnis BPR

Internal BPR

1. Penguatan Permodalan
   - Meningkatkan permodalan BPR.
   - Meningkatkan kinerjanya dengan pencapaian laba yang optimal

2. Perbaikan efisiensi secara gradual dan bertahap
   - Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kinerja
   - Menciptakan produk dan layanan yang kreatif untuk mengoptimalkan sumber dana murah
3. Meningkatkan pertumbuhan penyaluran kredit

4. Meningkatkan share kredit modal kerja dan produktif

5. Fokus melayani para pelaku UMKM

6. Penggunaan TI dalam operasional BPR
   - Menggunakan Teknologi Informasi dalam operasional BPR.
   - Menciptakan produk dan layanan berbasis TI baik yang dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan pihak ketiga.

Strategi dan Daya Dukung Pengembangan Bisnis BPR

Asosiasi Industri BPR

1. **Mengedukasi dan mendorong pemilik untuk meningkatkan permodalan BPR yang dimilikinya.**

2. **Mendorong BPR untuk terus meningkatkan kinerjanya dengan pencapaian laba yang optimal**

3. **Perbarindo melakukan sinergi dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk memperkuat industri BPR dengan penyediaan infrastruktur bersama dan terjangkau oleh seluruh pelaku Industri BPR.**

4. **Perbarindo memfasilitasi sinergi dengan Bank Umum dan Bank Pembangunan Daerah dalam program Linkage dan APEX Bank.**

5. **Perbarindo menjadi *public relations* bagi Industri BPR dalam upaya membangun citra positif industri dan melakukan *counter attack* terhadap pemberitaan yang negatif**

6. **Menjadi mitra strategis regulator baik dalam pengaturan maupun pembinaan industri BPR**

Strategi Pengembangan TI BPR

Harapan Pengembangan TI BPR

1 Core Banking

BPR memiliki platform tunggal dan *infrastructure technology* yang mempermudah proses perbankan dan menjalankan operasional bank dengan biaya lebih murah.

2 Leading in New Game

- ***Branchless Banking***
- ***Financial Inclusion/Layanan Keuangan Digital***
- ***MEA***

3 Opportunity New Bisnis

Fee based income

- ↘ **BPR dapat menerima pendapatan administrasi seperti biaya administrasi ATM dan jasa lainnya.**
- ↘ **BPR dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam *payment point.***

4 Efisiensi

- ↘ **Memperbesar porsi dana murah.**
- ↘ **Menurunkan *cost of fund.***

Strategi dan Daya Dukung Pengembangan TI BPR

Tantangan Pengembangan TI BPR

Security

Keamanan data tinggi & jaringan komunikasi yang private, real time dan akses yang mudah sebagaimana bank umum

Modern Banking

Realtime online banking, kemudahan akses, proses penyaluran kredit yang lebih mudah dan cepat

High Investment

BPR memiliki Kemampuan Terbatas, Sehingga menyulitkan dalam penggadaan fasilitas TI yang handal

High Competition

BPR mengalami trend pertumbuhan yang tinggi sehingga perlu *competitive advantage* untuk memenangkan pasar.

Reporting

Setiap lembaga perbankan berkewajiban melaporkan transaksi bulanan, tahunan, laporan keuangan kepada BI dan OJK

Strategi dan Daya Dukung Pengembangan TI BPR

Fitur yang dibutuhkan

Aspek Bisnis :

- Implementasi teknologi dengan biaya yang terjangkau / *affordable* dengan konsep *shared infrastructure*.
- Penyediaan layanan dengan service level yang berkualitas berbasis teknologi.
- Meningkatkan daya saing BPR melalui online banking.

Aspek Teknis :

- Infrastruktur yang aman, handal dan efisien.
- Pengembangan kapasitas sesuai dengan kebutuhan.
- *Compliance* terhadap standar yang berlaku, seperti *IT security*, pelaporan dan sistem operasional lainnya.

Strategi dan Daya Dukung Pengembangan SDM BPR

Pengembangan SDM BPR

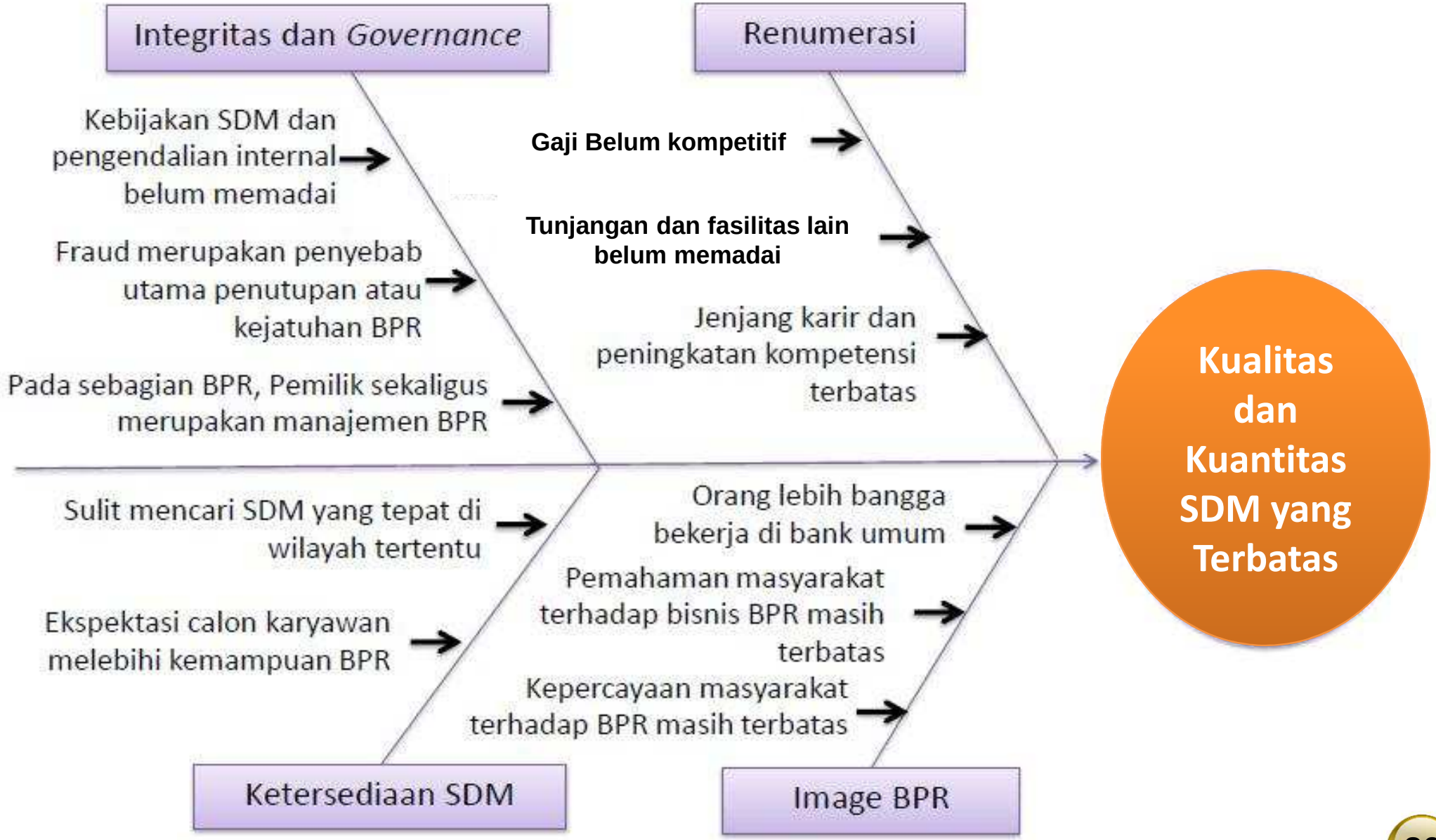

Strategi dan Daya Dukung Pengembangan SDM BPR

Internal BPR

Agar SDM BPR memiliki daya saing maka baik dari sisi Insan SDM maupun manajemen harus memiliki hal-hal sbb. :

INSAN SDM BPR :

1. Good Corporate Gorvernance (GCG) / Integritas tinggi.
2. Kompetensi :
   - Orientasi masa kini dan masa depan
   - Berpengetahuan
   - Adaptif terhadap perubahan
   - Komitmen terhadap kualitas
   - Kreatif dan inovatif
   - Continuous improvement
   - Mampu menggunakan TI

MANAJEMEN SDM BPR :

- Perencanaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas serta kegiatan perancangan pekerjaan bagi SDM.
- Perolehan dan penempatan SDM yang meliputi rekrutmen, seleksi dan penempatan.
- Pengembangan SDM meliputi pengembangan karir dan kemampuan kerja SDM (termasuk kompetensi di bidang TI)
- Perancangan sistem pemberian penghargaan penilaian kinerja dan sistem balas jasa.

TUJUAN AKHIR

TARGET BISNIS PERUSAHAAN

Strategi dan Daya Dukung Pengembangan SDM BPR

Asosiasi Industri BPR

1. Perbarindo berperan aktif dalam menjaga kualitas SDM Bankir BPR dengan terus mendorong sertifikasi bagi pengurus maupun calon pengurus BPR serta para pejabat eksekutifnya.

2. Perbarindo terlibat langsung dalam kepengurusan dewan certif yang bertugas menyusun modul untuk sertifikasi pengurus dan pejabat eksekutif BPR.

3. Perbarindo bersama perguruan tinggi memberikan beasiswa pasca sarjana (S2) bidang keuangan mikro bagi para pengurus BPR.

4. Perbarindo mendorong mitra pelatihan certif dan yayasan perbarindo meningkatkan kegiatan pelatihan untuk SDM BPR yang ada di wilayahnya masing-masing.

5. Perbarindo memfasilitasi pihak ketiga (Bank Umum dan Pihak lainnya) mengadakan pelatihan dan seminar bagi Anggota Perbarindo.

Kesimpulan

Dukungan regulator yang diperlukan :

1. **Regulasi yang kondusif untuk perkembangan Industri BPR**
2. **Mendorong Penguatan Permodalan serta Peran dan fungsi BPR yang diperluas**
3. **Program Pengembangan SDM dan Pemanfaatan Teknologi**
4. **Mendorong Sinergi antara Bank Umum dan Pemerintah dengan BPR dalam Program pengembangan UMKM**
5. **Mendorong Sinergi dengan Lembaga Penjamin Kredit**

Terima Kasih

DPP PERBARINDO
KOMP. PATRA II, No. 46
Jl. Jend. Ahmad Yani, Bypass, Cempaka Putih
Jakarta Pusat - Indonesia 10510
Phone : 021 - 4261445 Fax : 021 - 4261463
E-mail : dpp@perbarindo.or.id; dpp_perbarindo@yahoo.com
www.perbarindo.or.id